

**KONSTRUKSI MEDIA**  
**TENTANG REALITAS KORUPSI ANGGOTA PARLEMEN**  
**Analisis Teks Norman Fairclough Terhadap Teks/Berita Korupsi Anggota DPR RI**  
**Terkait Kasus Aliran Dana BI di DPR dalam Surat kabar Media Indonesia**

**Hasyim Ali Imran**

Peneliti Madya Bidang Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta, Badan Litbang SDM  
Kementerian Kominfo, Jln. Pegangsaan Timur No.19 B, Jakarta Pusat  
(Naskah diterima 5 Februari 2011, disetujui terbit 7 April 2011)

**ABSTRACT**

*This research tries to address a problem on how media (Media Indonesia) construct texts/ reality news about corruption of Indonesian parliament's member in the case of flow of funds of Bank Indonesia in Indonesian parliament and emerging discourse in the process of its construction. The goal of this research is to know how Media Indonesia construct texts/news about corruption of Indonesian parliament's member pertaining flow of funds of Bank Indonesia in Indonesian parliament. The assumptions on which this problems based are: first, news diccourse makes up integral part of framing process in a number of issues. Second: when media report about the content, it is indicated that there is ideology factor and power influencing news making. Third, there is certain dominant groups which tend to be able to control undominant groups or even to marginalize them by predominating media. Those reasons guide this research to harness paradigm of constructivism. In this relation, theoretical concept used is: News is a reality constructed and media discourse. To answer this problem, this research uses analytical method of Norman Fairclough. The result shows that in constructing corruption done by parliaments member in Bank Indonesia's flow of funds, media direct into emerging a discourse in case of BI's flow of funds that parliament members are more dominantly determined as corruptors. In that position, parliament's members are positioned unfairly to each other: as main players, as proponent players, and players who are victimize for other party's interests. Meanwhile, the discourse that parliament's members regarded as whistle-blowers in the embezzlement of Bank Indonesia's flow of funds, never become media's choice. Emerging that discourse, theoretically, it is enabled by –in constructivism's view- subject (media) are regarded as central factor of discourse activity which is able to control in order to achieve media's vested interest.*

**Key words:** *Media construction, Reality*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan tentang bagaimana media (Media Indonesia) mengkonstruksi teks/berita realitas korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI dan wacana apa yang muncul dalam pengkonstruksian itu. Tujuan penelitian yaitu Ingin mengetahui cara Surat kabar Media Indonesia dalam mengkonstruksi teks/berita tentang korupsi Anggota DPR RI dalam kasus aliran dana BI di DPR RI. Asumsi-asumsi yang mendasari permasalahan ini adalah: *pertama,*

wacana berita merupakan bagian integral dari proses *framing* sejumlah isu. *Kedua*, pada saat media memberitakan isinya diindikasikan adanya faktor-faktor ideologi dan kekuasaan yang memberikan pengaruh dalam pengemasan berita. *Ketiga*, adanya kelompok yang dominan cenderung dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan bahkan memarginalkan mereka dengan menguasai media. Alasan-alasan tersebut mengarahkan penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Dalam kaitan ini, konsep-konsep teoritik yang digunakan yaitu: Berita sebagai Konstruksi Realitas dan Wacana Media. Untuk menjawab permasalahan, penelitian ini menggunakan metode analisis teks Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengkonstruksian realitas tentang korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI, media mengarahkannya pada munculnya wacana bahwa dalam kasus aliran dana BI tadi, anggota dewan lebih dominan dipilih dalam posisi sebagai pemain korupsi. Sebagai pemain korupsi, anggota dewan diposisikan secara berbeda, yakni sebagai pemain utama, sebagai pemain pendukung, dan sebagaimana pemain yang menjadi korban kepentingan pihak lain. Sementara wacana anggota dewan sebagai wasit dalam kasus korupsi aliran dana BI, tidak pernah menjadi pilihan media. Munculnya pewartawanan yang demikian, secara teoritis ini dimungkinkan karena dalam pandangan konstruktivis, subjek yang dalam hal ini media, dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana yang memiliki kemampuan dalam melakukan kontrol guna mencapai maksud-maksud tertentu dari media.

**Kata-kata kunci : Konstruksi Media, Realitas**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang dan Permasalahan

Di Indonesia, menurut sementara pihak fenomena korupsi memang sudah relatif parah. Anawary (2005) berpendapat bahwa korupsi sudah merambah kemana-mana menggerogoti batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Gadrida Rosdiana Djukana (2007), tindak korupsi di Indonesia juga telah mengakibatkan tingginya angka kemiskinan, bombastisnya tingkat kematian ibu hamil, parahnya angka kekerasan terhadap perempuan, melonjaknya angka putus sekolah, meningkatnya pengidap gizi buruk dan merebaknya persoalan kriminalitas<sup>1</sup>.

Menurut hasil survei mengenai *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dilakukan Transparency Internasional (TI) tahun 2001, Indonesia memang termasuk satu di antara 13 negara yang terkorup di dunia ini. Negara lainnya yaitu (disusun menurut abjad) Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina. Hasil polling online Transparency Internasional (TI) Indonesia per 31 Januari 2008 juga menunjukkan 79% responden setuju kalau Indonesia termasuk salah satu dari 38 negara terkorup di dunia, dengan mana lembaga peradilan Indonesia disetujui semua responden sebagai institusi tertinggi tingkat korupsinya<sup>2</sup>. Fenomena empirikal yang demikian, dengan

<sup>1</sup> Dalam, Paul SinlaEloE, dalam <http://groups.yahoo.com/group/indonesian-studies>.

<sup>2</sup> *Transparency Internasional (TI) Indonesia*, dalam <http://www.ti.or.id/polling/9/>.

demikian tentunya dapat menjadi penguat bagi opini sebelumnya mengenai kondisi korupsi di Indonesia.

Terhadap kondisi korupsi di Indonesia yang demikian rupa, pemerintahan pada era reformasi dalam periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, menyadarinya dan berkomitmen tinggi untuk memeranginya. Sebagai perwujudannya, untuk efektifitasnya pemerintah membentuk institusi khusus dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam operasional upaya pemberantasan korupsi, institusi ini mengacu pada pengertian sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, di mana disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>3</sup> Dengan pengertian ini, melalui undang-undang yang sama, definisi korupsi secara konkrit dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal dimaksud, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dengan mana, ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi korupsi-korupsi yang berkaitan dengan persoalan : kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi<sup>4</sup>.

Sejak beroperasinya, banyak kasus korupsi berhasil diungkap oleh KPK. Beberapa diantaranya yang termasuk kasus korupsi besar dan populer adalah menyangkut fenomena korupsi di tubuh organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bank Indonesia (BI). Terkait dengan BI, kasus korupsinya berhubungan dengan soal pengucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke sejumlah bank di Indonesia beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 1998<sup>5</sup>.

Dalam proses pelaksanaan pengucurannya, dana BLBI<sup>6</sup> ini banyak yang diselewengkan oleh penerimanya. Proses penyalurannya pun banyak yang mengalami penyimpangan-

<sup>3</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK, hal. 11.

<sup>4</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK, hal. 4-5.

<sup>5</sup> **Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)** adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun. = Penerima dana BLBI antara lain Agus Anwar (Bank Pelita), Samadikun Hartono (Bank Modern), Kaharuddin Ongko (Bank Umum Nasional), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian), Atang Latief (Bank Indonesia Raya), Lidia Mughtar dan Omar Putihraj (Bank Tamara), Adisaputra Januarydy dan James Januarydy (Bank Namura Yasonta), Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa), Santosa Sumali (Bank Metropolitan dan Bank Bahari), Fadel Muhammad (Bank Intan), Baringin MH Panggabean dan Joseph Januarydy (Bank Namura Internusa), Trijono Gondokusumo (bank Putera Surya Perkasa), Hengky Wijaya dan Tony Tanjung (Bank Tata), I Gide Dermawan dan Made Sudiarta (Bank Aken), Tarunojo Nusa dan David Nusa Wijaya (Bank Umum Servitia). (lihat, [http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_Likuiditas\\_Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia)).

<sup>6</sup> Menurut J. Soedradjad Djiwandono, Gurubesar tetap Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, BLBI merupakan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidak seimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena jenis fasilitas yang beragam ini secara umum dapat dikatakan bahwa BLBI adalah fasilitas likuiditas BI yang diberikan kepada bank-bank diluar kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. - Meskipun bantuan likuiditas untuk menghadapi masalah perbankan ini sudah ada dan dipergunakan sejak lama, **istilah bantuan likuiditas BI atau BLBI baru digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1998**. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dukungan IMF yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai *liquidity supports*. Untuk membedakan dengan KLBI yang lebih dikenal secara umum dan sebagai terjemahan dari liquidity support telah digunakan istilah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Pada dasarnya **BLBI terdiri atas 5 jenis fasilitas** sebagai berikut: 1) Fasilitas dalam rangka **mempertahankan kestabilan sistem pembayaran** yang bisa terganggu karena adanya *mismatch* atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangka pendek disebut *fasilitas diskonto atau fasdis I* dan yang berjangka lebih panjang, disebut *fasdis II*; 2) Fasilitas dalam rangka **operasi pasar terbuka** (OPT) sejalan dengan program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral; 3) Fasilitas dalam rangka **penyehatan (nursing atau rescue) bank** dalam bentuk kredit likuiditas darurat

penyimpangan. Beberapa mantan direktur BI yang telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo. Sementara dari kalangan bank penerima, meliputi : Bank Ficorinvest: mantan presdir Ficorinvest, Supari Dhirdjoprawiro dan S. Soemeri divonis hukuman 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 2003. Saat ini masih bebas karena mengajukan kasasi. Bank Umum Servitia: dirut Servitia, David Nusa Wijaya divonis 8 tahun penjara oleh MA pada tanggal 23 Juli 2003, sempat melarikan diri ke AS namun tertangkap di sana. Bank Harapan Sentosa: Hendra Rahardja dihukum seumur hidup, namun melarikan diri ke Australia dan meninggal di sana, Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian, divonis 20 tahun, namun juga melarikan diri ke Australia. Bank Surya: Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan, dihukum seumur hidup, namun melarikan diri ke Singapura. Bank Modern: Samadikun Hartono, divonis 4 tahun, melarikan diri. Bank Pelita: Agus Anwar, dalam proses pengadilan, namun sudah melarikan diri. Bank Umum Nasional: Sjamsul Nursalim, penyidikan dihentikan. Bank Asia Pacific (Aspac): Hendrawan Haryono, mantan wakil Dirut Aspac divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bank Indonesia Raya (Bank Bira): Atang Latif, melarikan diri ke Singapura sebelum kasusnya disidangkan.<sup>7</sup>

Dengan latar belakang historikal seperti itu, tampak bahwa kasus korupsi BLBI sebenarnya merupakan kasus yang sudah lama (sekitar 10 tahun) akan tetapi belum mencapai ketuntasan. Proses pengusutannya berlarut-larut dan tidak berlangsung mulus. Situasi yang demikian menyebabkan kasus ini menjadi perhatian banyak pihak. Munculnya perhatian ini sendiri, menurut akademisi karena kasusnya juga berkaitan dengan berbagai fasilitas BI kepada bank-bank penerima dalam bentuk lain<sup>8</sup> Bantuan likuiditas yang dipertanyakan proses penyaluran dan pemanfaatannya serta dipersoalkan pembebanan pembiayaannya ini, telah menjadi masalah yang banyak dipergunjingkan di masyarakat. Masalah ini lebih mencuat lagi setelah diumumkannya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia yang memberikan opini *disclaimer*. Artinya, BPK tidak bersedia memberikan pendapat karena berbagai hal, seperti lemahnya pengawasan internal dan pembukuan yang tidak beres. Audit BPK juga secara spesifik dilakukan terhadap BLBI. Dalam testimoni Gubernur BI dengan Komisi IX DPR RI telah disepakati untuk *investigative audit* tentang BLBI.<sup>9</sup>

---

(KLD) dan kredit sub-ordinasi (SOL); 4) Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan **adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (bank run atau rush)** dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya *saldo negatif atau saldo debit atau overdraft* rekening bank di BI; 5) Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk **membayar kewajiban luar negeri bank dan untuk pelaksanaan sistem penjaminan (blanket guarantee)**. (dalam : [http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan\\_blbi.html](http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan_blbi.html)).

<sup>7</sup> lihat, [http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_Likuiditas\\_Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia), diambil, 14 Maret 2008).

<sup>8</sup> Menurut J. Soedradjad Djiwandono, pada dasarnya BLBI terdiri atas 5 jenis fasilitas sebagai berikut: 1) Fasilitas dalam rangka **mempertahankan kestabilan sistem pembayaran** yang bisa terganggu karena adanya *mismatch* atau kesenjangan antara penerimaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangka pendek disebut *fasilitas diskonto atau fasdis I* dan yang berjangka lebih panjang, disebut *fasdis II*; 2) Fasilitas dalam rangka **operasi pasar terbuka (OPT)** sejalan dengan program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral; 3) Fasilitas dalam rangka **penyehatan (nursing atau rescue) bank** dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit sub-ordinasi (SOL); 4) Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan **adanya penarikan dana perbankan secara besar-besaran (bank run atau rush)** dalam bentuk penarikan cadangan wajib (GWM) atau adanya *saldo negatif atau saldo debit atau overdraft* rekening bank di BI; 5) Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk **membayar kewajiban luar negeri bank dan untuk pelaksanaan sistem penjaminan (blanket guarantee)**. ([http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan\\_blbi.html](http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan_blbi.html), taken on fryday, March 14, 2008).

<sup>9</sup> J. Soedradjad Djiwandono, dalam ([http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan\\_blbi.html](http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan_blbi.html), taken on friday, March 14, 2008).

Dalam realita, maka sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Gubernur BI dengan Komisi IX DPR RI, proses investigasi itu dilakukan oleh KPK. Hasil investigasi KPK terhadap hasil audit BPK mengenai BLBI yang disebutkan berindikasi korupsi<sup>10</sup> itu, sebagaimana dilansir berbagai media<sup>11</sup> menunjukkan bahwa indikasi korupsi dalam aliran dana BI senilai Rp 100 milyar tadi, terpecah menjadi dua bagian. Bagian pertama senilai Rp 68,5 milyar digunakan untuk membiayai proses hukum sejumlah mantan pejabat BI yang terganjal kasus BLBI saat krisis ekonomi 1997-1998 dan sebagian lagi sejumlah Rp 31,5 milyar dialirkan Rusli Simanjuntak ke DPR RI untuk pembahasan sejumlah UU terkait dengan BI seperti RUU Likuidasi Bank dan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>12</sup>

Indikasi korupsi dalam aliran sebagian dana BI tadi, dalam realitas praktik komunikasi bermedia, itu mendapat perhatian serius dari kalangan praktisi media. Berdasarkan fenomenanya, keseriusan perhatian mereka itu tampak mereka wujudkan dalam bentuk karya-karya jurnalistik yang sifatnya mengerucut pada upaya penonjolan subyek-subyek yang terindikasi sebagai koruptor dalam aliran dana dimaksud. Meskipun demikian, dalam penonjolannya ada kecenderungan bahwa di antara sesama media, misalnya media cetak surat kabar, sifatnya tidak sama. Misalnya, media yang satu cenderung menonjolkan subyek 'koruptor' dalam posisinya sebagai individu. Namun ada pula yang menonjolkan subyek 'koruptor' itu dalam posisinya sebagai organisasi.

Dalam kaitan penonjolan subyek 'koruptor' yang lebih diposisikan dalam konteks organisasi tadi, maka ini misalnya seperti yang disajikan oleh Media Indonesia, terutama berkaitan dengan kasus aliran dana BI sejumlah Rp 31,5 milyar ke DPR. Dalam edisi 31 Januari 2008, surat kabar ini menurunkan *headline* di halaman pertama dengan judul "KPK Bidik Anggota DPR". Dengan luas hampir mencapai semua halaman satu, halaman ini dilengkapi pula dengan judul berita lain yang berbunyi, "Sogok di Senayan Bukan Hal Baru", yang secara substansial isinya bersifat sebagai pelengkap yang mempertajam isi pemberitaan dari judul *headline*. Dalam edisi yang sama, Republika juga menurunkan berita mengenai persoalan serupa. Namun berbeda dengan Media Indonesia, Republika menyajikannya dengan judul *headline* yang relatif lebih *soft*, "KPK Mulai Bidik Anggota DPR". Selain itu, di samping kuantitasnya yang relatif lebih kecil, harian ini juga tidak menyertainya dengan tulisan lain di halaman yang sama yang sifatnya mempertajam isi pemberitaan *headline*, sebagaimana dilakukan oleh Media Indonesia.

Perbedaan lainnya di antara kedua surat kabar dimaksud, yakni berkaitan dengan penyajian unsur *subyek* sebagai individu yang terindikasi sebagai koruptor dalam pemberitaan. Media Indonesia, dalam pemberitaannya mengenai subyek dimaksud, mengangkat identitas tersebut secara lengkap dalam *lead* beritanya, "..... Di antara anggota DPR itu adalah Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu." Padahal, Ketua KPK Antasari Azhar sendiri, yang nota bene menjadi sumber berita mereka dalam sebuah jumpa pers yang dilaksanakan KPK, menyebutkan individu yang terindikasi sebagai koruptor itu melalui inisial saja, yakni AZA dan

<sup>10</sup> Adanya indikasi korupsi ini, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, berawal dari laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar nasution kepada KPK pada 14 November 2006, yang menyebutkan bahwa BPK menemukan indikasi korupsi dalam aliran dana BI sebesar Rp 100 milyar. (lihat, Media Indonesia, 29 Januari 2008 : hal. 1).

<sup>11</sup> Diantara media yang melansirnya adalah : Media Indonesia, edisi 29, 30 dan 31 Januari 2008; Republika edisi 30 dan 31 Januari 2008; Kompas 30 Januari 2008 dan Rakyat Merdeka 5 Maret 2008.

<sup>12</sup> Lihat, Media Indonesia, Selasa, 29 Januari 2008, Editorial, hlm 1.

HY. Dengan perbedaan ini, berarti antara pihak Media Indonesia dan KPK tidak ada kesepahaman dalam menjunjung prinsip *presumption of innocent* dalam hukum. Pada gilirannya, KPK yang menjunjung prinsip tersebut dengan sendirinya telah berupaya menghindarkan kondisi *trial by the press* atas individu yang terindikasi korupsi, sementara pihak Media Indonesia sebaliknya, melakukan tindakan *trial by the press* atas individu yang terindikasi korupsi.

Berbeda dengan Harian Republika, di samping mengandung *euphemisme*<sup>13</sup> ada indikasi kalau harian ini cenderung lebih menjunjung prinsip *presumption of innocent* dalam pemberitaannya mengenai kasus keterlibatan anggota DPR tadi. Itu terlihat dari *lead* beritanya, ".....(KPK) mulai membidik Senayan. Ketua KPK, Antasari Azhari, menyebut dua inisial anggota DPR yang diduga terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia." Dengan perbedaan di antara kedua surat kabar, ini dapat diartikan bahwa terhadap isu yang sama, masing-masing media cenderung saling memiliki caranya sendiri dalam menyampaikannya kepada khalayak luas. Dengan kata lain, masing-masing media cenderung tidak sama dalam mewacanakannya kepada pembaca. Tidak diketahui jelas apa sebabnya menjadi berbeda, namun yang pasti di balik pemberitaan mereka dengan caranya sendiri itu, terdapat sejumlah kepentingan, apakah itu menyangkut pemilik media, ekonomi, rutinitas atau bahkan karena ideologi tertentu, misalnya ideologi politik.

Berdasarkan pemaparan argumen pada bagian latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, maka penelitian ini tidak bermaksud melihat lebih jauh mengenai penyebab munculnya perbedaan dalam pewacanaan media terkait isu korupsi anggota parlemen yang diantaranya disebutkan berindikasi karena terdapat sejumlah kepentingan tadi, melainkan hanya terbatas pada upaya menemukan bagaimana media mewacanakan anggota parlemen dalam kaitan kasus aliran dana BI di DPR. Dengan membatasi obyek analisis wacana hanya pada teks/berita yang terdapat pada Harian Media Indonesia, maka permasalahan penelitian ini rumusannya menjadi sebagai berikut : "Bagaimana media (Media Indonesia) mengkonstruksi teks/berita realitas korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI dan wacana apa yang muncul dalam pengkonstruksian itu ?"

Dengan rumusan permasalahan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : Ingin mengetahui cara Surat kabar Media Indonesia dalam mengkonstruksi teks/berita tentang korupsi Anggota DPR RI dalam kasus aliran dana BI di DPR RI. Secara teoritis temuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi ilmiah tentang studi pewacanaan media mengenai teks korupsi, khususnya menyangkut teks korupsi yang melibatkan anggota DPR sebagai pihak yang menjadi bagian dari lembaga terhormat yang nota bene idealnya menjadi pengayom bagi setiap individu negara bangsa (*nation state*) Indonesia.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan mengungkap bagaimana konstruksi realitas media yang berada di balik wacana korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI, yang diberitakan dalam surat kabar. Asumsi-asumsi yang mendasari permasalahan ini adalah: *Pertama*, wacana berita merupakan bagian integral dari proses *framing* sejumlah isu. *Kedua*, pada saat media memberitakan isinya diindikasikan adanya faktor-faktor ideologi dan

---

<sup>13</sup> Ini ditandai dengan penggantian kata 'DPR' dengan 'Senayan' dalam lead berita.

kekuasaan yang memberikan pengaruh dalam pengemasan berita. *Ketiga*, adanya kelompok yang dominan cenderung dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan bahkan memarginalkan mereka dengan menguasai media.

Alasan-alasan tersebut mengarahkan penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Menurut paradigma konstruktivis, bahwa realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuknya yang asli (apa adanya) melainkan harus diseleksi melalui cara orang itu memandang setiap hal yang ada (Littlejohn, 2002: 112-113).

Menurut pandangan konstruktivisme kebenaran dan pengetahuan obyektif sesungguhnya bukan ditemukan, melainkan diciptakan oleh individu (Schwandit, 1994:128). Apa yang dilihat nyata tidak lain merupakan konstruksi pikiran individu dan ia sebenarnya bersifat majemuk, bertentangan, terkonstruksi dan bermakna. Kebenaran adalah persoalan banyaknya informasi dan konstruksi secara mufakat dianggap terbaik atau tercanggih pada saat tertentu (Op.Cit, 128).

Walaupun perspektif konstruktivis sangat bersifat politis dan ideologis, tetapi setidaknya-tidaknya ada beberapa aspek penting diantaranya adalah: *pertama* teori konstruktivis diperlukan untuk memberikan pengalaman dalam masyarakat. Dalam penelitian ini diharapkan dapat melihat konstruksi realitas berita tentang korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI dalam surat kabar Media Indonesia. *Kedua* teori konstruktivis dapat dimanfaatkan untuk mengkaji kondisi sosial yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. *Ketiga* teori konstruktivis ditujukan untuk memadukan aspek-aspek teoritik dengan aktivitas-aktivitas dalam tindakan nyata. Teori dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga penjelasan dari teori dapat diterapkan dalam sebuah aktivitas dan realitas sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan dengan melihat konteks permasalahan secara utuh, dengan fokus penelitian pada 'proses' dan bukan pada 'hasil', dengan menggunakan pendekatan Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moeleng, 1993:3).

Adapun jenis penelitian lebih bersifat *deskriptif-kualitatif*, yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai sesuatu hal atau fenomena, dalam hal ini ingin menggambarkan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi media massa *Media Indonesia* dalam mengkonstruksi realitas atau peristiwa korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Sejumlah karakteristik penelitian kualitatif menurut Lexy J Moeleong (1993:4-7), yaitu penelitian dimulai dengan pertanyaan penelitian dan teori dikembangkan selama proses pengumpulan data. Karena lebih bersifat induktif, maka teori dibangun dari data *grounded*. Konseptualisasi dan operasionalisasi penelitian kualitatif bisa terjadi secara serempak. Ciri lainnya adalah penelitian kualitatif menempatkan diri sebagai *insider* yang berusaha sejauh mungkin melakukan empati atau memproyeksikan diri dalam peran dan persepsi objek yang diteliti dan penelitian jenis ini melakukan penelitiannya pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu entitas. Artinya setiap fenomena dalam penelitian tidak bisa lepas dari konteks. Disamping itu, penelitian kualitatif juga berkepentingan untuk menemukan suatu kebenaran atau *a truth* mengenai fenomena dalam konteks di mana penelitian dilakukan *ideographic*.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, untuk menjawab masalah penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, di mana informasi yang didapatkan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana Media Indonesia mengkonstruksi realitas korupsi anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI ke anggota DPR.

Penelitian ini menggunakan metode analisis teks Norman Fairclough. Dalam bukunya *Analysing Discourse-Textual Analysis for Sosial Research* ia menyebutkan terdapat 12 komponen yang harus dijawab dalam melaksanakan analisis suatu teks. Guna kepentingan proses pengumpulan data, terkait dengan penelitian ini penulis memodifikasi komponen-komponen tadi ke dalam bentuk matriks sebagai berikut :

### Analisis Teks Norman Fairclough

(Fairclough, 2005, *Analysing Discourse-Textual Analysis for Sosial Research*, London and New York, Routledge, p. 191-195 )

Elemen Analisis Teks	Terjemahan	Keterangan/Penjelasan
1. Social Event	Teks berita itu menjadi bagian dari rangkaian peristiwa sosial apa?	
2. Genre	Apakah tersebut berada pada rangkaian genre berita tertentu. Atau merupakan mix genre?	
3. Difference	Kombinasi apa yang ada mengikuti karakteristik skenario yang diorientasikan dalam perbedaan dalam teks. Ini menyangkut keterbukaan, penerimaan, pengenalan dari perbedaan. Aksentuasi dari perbedaan, konflik, polemik, dominasi atau perjuangan atas makna, norma dan kekuasaan.	
4. Intertextuality	Kutipan-kutipan yang dimasukkan dan yang tidak dimasukkan atau yang beratribut secara langsung atau tidak langsung. Apakah menyangkut pada pengarang atau sumber tertentu atau ada sangkutan dengan sumber lain atau sangkutan atas keduanya.	
5. Assumptions	Asumsi ekstensial, proporsional dan nilai yang dibuat dalam teks. Apakah ada sesuatu yang dilihat atau diasumsikan sebagai sesuatu yang bersifat ideologi ?	
6. Semantic/Gramatical relations between Sentences and clauses	Relasi semantic predomnan apa yang ada di antara kalimat-kalimat dan klausa (kata majemuk). (kausalitas, alasan, tujuan, konsekuensi, kondisional, temporal, aditif, elaboratif, kontrasif – konsesive. Apakah ada hubungan semantic yang levelnya ditinggikan melalui penekanan yang sangat besar pada satu teks. Misalnya: Problem X Solusi . Apakah ada relasi gramatikal pada klausa-klausa yang secara predomnan berbentuk para taktik (terpisah), hipotaktik (samar-samar), atau menempel (embedded). Adakah relasi khusus yang secara signifikan mengenai ekuivalen dan diffren yang dibangun di dalam teks?	:
7. Exchanges, Speech function and grammatical mood	Bentuk-bentuk perubahan . Fungsi2 ujaran (pernyataan, pertanyaan, penawaran, permintaan) ? Tipe2 pernyataan apa saja yang ada di sana. Ada yang bersifat fakta, prediksi, hipotesis, evaluasi ? Adakah relasi metaforik antara pertukaran fungsi ujaran atau tipe2 pernyataan. Apakah Mood gramatika yang predomnan yang terdapat dalam teks (deklaratif, interogatif, imperative) ?	
8. Discourses	diskursus . Wacana apa yang digambarkan di dalam teks. Bagaimana wacana2 itu terbentuk secara bersama. Adakah percampuran yang signifikan dari wacana2 tersebut ? Karakteristik apa yang ada dalam fitur wacana (semantik dalam relasi kata2, kolokasi, metafora, asumsi, fitur gramatika)	
9. Representation of social events	Menyangkut elemen-elemen dari representasi suatu peristiwa, apakah dimasukkan dalam teks atau tidak, atau kecenderungan untuk ditonjolkan. A. Bagaimana ruang waktu dan relasi ruang waktu direpresentasikan ?	



	<p>Secara rinci komponen yang perlu dijawab adalah , sbb. :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. waktu dan tempat :</li> <li>2. Orang-orang (person) : kepercayaan, hasrat, nilai, sejarah.:</li> <li>3. bentuk aktifitas :</li> <li>4. Relasi sosial, bentuk institusional :</li> <li>5. Bahasa/tanda :</li> <li>6. Objects :</li> <li>7. Alat :</li> </ol> <p>B. Social event direpresentasikan secara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. abstrak</li> <li>b. konkrit</li> </ol> <p>C. Bagaimana proses Representasinya ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. material : <ul style="list-style-type: none"> <li>-aktor</li> <li>-affected (korban)</li> </ul> </li> <li>b. kalimat yg dinyatakan aktor (verbal)</li> <li>c. mental : <ul style="list-style-type: none"> <li>-experience</li> <li>-fenomena</li> </ul> </li> <li>d. Relational : <ul style="list-style-type: none"> <li>-atributif (pengatributan-memperlambangkan )</li> <li>-Relational : value/token</li> </ul> </li> <li>f. eksistensial</li> </ol> <p>D. Adakah metafor gramatika dalam representasi dari proses sosial (sosial event):</p> <p>E. Sosial aktor :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inklusi/eksklusi :</li> <li>2. noun/pronoun :</li> <li>3. aktif/pasif :</li> <li>4. personal/impersonal :</li> <li>5. name/classified (mis. Oknum,dll) :</li> <li>6. Spesifik/generic :</li> </ol>	
10. Styles	Style seperti apa yg tergambar dalam teks. Bagaimana gaya2 tersebut dibentuk bersama. Adakah campuran yang signifikan antara gaya2 tersebut? Karakteristik seperti apa yg dimiliki oleh fitur gaya2 yang digambarkan ?	
11. Modality	Bagaimana si penulis/pengarang berkomitmen terhadap diri mereka dalam kerangka mengungkapkan kebenaran atau dalam terma kewajiban dan kebutuhan. Apakah mereka mengungkapkan eksistensi yg menyangkut kategori modalitas tertentu, seperti persetujuan atau penyangkalan. Apakah penanda eksplisit dari modalitas itu? Bagaimana <i>komitmen</i> yg dibangun pada modalitas yg dimodalisasinya ? Apa penanda dari modalisasi itu ?	
12. Evaluation	Nilai-nilai apa yang diarahkan (dibawa) oleh si penulis itu ? Dengan cara apa direalisasinya dalam teks ?	

Selanjutnya, masih terkait dengan methodologi, maka terkait *obyek penelitian*, dalam penelitian ini maka yang dijadikan obyek adalah pemberitaan dalam surat kabar Media Indonesia yang berhubungan dengan masalah keterlibatan Anggota DPR RI dalam kasus aliran dana BI di kalangan anggota DPR sejumlah Rp 31,5. Pemberitaan mana, semula diketahui muncul pertama kali dalam edisi 31 Januari 2008.

Menyangkut *teknik analisis*, maka penelitian ini akan mengikuti pola kerangka analisis teks Fairclough sebagaimana telah penulis modifikasi sebelumnya ke dalam bentuk matriks. Untuk kepentingan ini maka teks yang dijadikan bahan analisis adalah berita-berita korupsi yang melibatkan anggota DPR RI dalam masa-masa sejak munculnya pemberitaan itu, yaitu sejak 2 November 2007 hingga Pebruari tahun 2008. Dengan kegiatan ini maka penelitian ini hanya berusaha sebatas menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks. Dengan kata lain, kegiatan dalam tahap ini hanya menganalisis isi dan bahasa yang dipakai dalam pemberitaan korupsi terkait keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus aliran dana BI di DPR RI di Media Indonesia.

### **Konsep Teoritik**

Dalam pandangan konstruktivisme, menurut Bennet, sebagaimana dikutip oleh Hidayat (1997:20), media massa bukan hanya sebagai saluran pesan, tetapi sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, pandangan, bias dan pemihakannya. Di sini media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, pandangan ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa media merupakan tempat saluran yang bebas. Begitu pula berita yang dibaca dan didengar dari media massa bukan hanya menggambarkan realitas, dan menunjukkan sumber berita tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Melalui berbagai instrumen yang dimiliki, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan di Indonesia, misalnya peristiwa bom Bali beberapa tahun yang lalu. Hal itu bukan menunjukkan realitas yang sebenarnya, tetapi menggambarkan bagaimana media ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas.

Strategi media massa melakukan konstruksi realitas Menurut Ibnu Hamad (2004: 15), “elemen dasar seluruh isi media massa, entah itu hasil liputan seperti berita, laporan pandangan mata, atau hasil analisis berupa artikel, opini adalah bahasa (verbal dan non verbal). Isi media cetak adalah bahasa tertulis baik berbentuk kata, angka, gambar ataupun grafis. Media radio menggunakan ucapan dan suara. Media TV menggabungkan bahasa tulisan, ujaran, gambar dan bunyi-bunyian (*audiovisual*). Dengan bahasa para pekerja media mengkonstruksikan setiap realitas yang diliputnya. Sementara itu bahasa merupakan nyawa kehidupan bagi media massa. Hanya dengan melalui bahasa para pekerja media bisa menghadirkan hasil liputannya bagi masyarakat. Setiap hari, para pekerja media memanfaatkan realitas baik dalam bentuk peristiwa, keadaan maupun benda kepada masyarakat dengan bahasa mereka menentukan gambaran beragam realitas kedalam benak masyarakat.

Isi media menurut Alex Sobur (2001:88-89), pada hakekatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat mempresentasikan realitas, namun juga menentukan gambaran seperti apa yang akan dikemas oleh bahasa tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Akibatnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya.

Istilah “realitas” mulai dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Berger, 1990: 304), lewat bukunya yang bertajuk “*Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*”. Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya di mana individu secara instan menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Berger dan Luckman menggambarkan bahwa realitas sosial

dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Pekerjaan media massa pada hakekatnya adalah bagaimana mengkonstruksi berbagai realitas yang dipilihnya, menjadi realitas politik. Tiga tahapan ini atau “momen”, tersebut yaitu: *Pertama*, eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. *Kedua*, obyektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas obyektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu efektifitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses obyektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas sesuai generis. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materil dalam bentuk bahasa, baik alat itu tadi maupun bahasa adalah kegiatan manusia. Setelah dihasilkan baik benda ataupun bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang obyektif, ada di luar kesadaran manusia, ada di sana bagi setiap orang. Realitas obyektif itu berbeda dengan kenyataan subyektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. *Ketiga*, internalisasi, proses internalisasi lebih menerapkan penyerapan kembali dua obyektif ini ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subyektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam alur dari dunia yang telah terobyektifasikan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran, melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Realitas subyektif dan obyektif adalah sebuah alat yang membentuk realitas manusia di dalam kehidupannya. Peter L. Berger dan Thomas Luckman ( 1990: 305), berpendapat bahwa realitas subyektif dan obyektif, manusia merupakan alat dalam menciptakan realitas yang obyektif melalui proses eksternalisasi. Dengan demikian masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia sebagai produk masyarakat yang keduanya berlangsung sangat dialektis; tesis, antitesis dan sintesis. Secara teknis, tesis utama Berger dan Luckman adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural ditandai dengan adanya relativitas seseorang ketika melihat kenyataan dan pengetahuan. Masyarakat adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilannya. Sebaliknya manusia juga produk masyarakat. Seseorang atau individu menjadi pribadi yang beridentitas jika tetap tinggal dan menjadi entitas dari masyarakatnya.

Jadi sebenarnya realitas yang dibaca atau didengar setiap hari oleh masyarakat merupakan produk dari pembentukan realitas oleh media. Medialah yang sebenarnya memilih kejadian mana yang layak ditampilkan sebagai bahan berita dan mana yang tidak layak. Di sisi lain media juga memilih orang atau tokoh sebagai nara sumber berita yang berdasarkan kriterianya sehingga hasil pemberitaannya cenderung sepihak. Dan pada akhirnya media bukan hanya memilih peristiwa dan sumber berita dengan lewat pemberitaannya tetapi media juga sangat ikut andil dalam membingkai peristiwa dengan bingkai-bingkai tertentu. Sementara peristiwa yang telah terbingkai oleh simbol – simbol tertentu didengar dan dibaca oleh masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat sendiri tidak dapat melihat menurut bingkainya sendiri. Para praktisi pers biasanya terlibat dalam usaha-usaha mengkonstruksi realitas, seperti

mencari fakta, yang dikumpulkan ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita, rangkaian kata atau gabungan keduanya. Berbagai macam kejadian atau peristiwa yang disajikan dalam media merupakan realitas yang telah dikonstruksi.

Berita yang muncul dalam pikiran manusia itu bukan suatu peristiwa, tapi lebih merupakan sesuatu yang diterjemahkan oleh akal dan pikiran manusia setelah peristiwa itu terjadi. Berita tidak identik dengan fakta peristiwa tetapi melainkan sebuah upaya untuk merekonstruksi fakta dalam kerangka inti peristiwa. Berita pada kenyataannya adalah hasil konstruksi realitas dengan menggunakan bahasa sebagai alat dasar, dan bahasa dapat menentukan cerminan seperti apa yang akan dikemas tentang peristiwa yang sebenarnya. Konstruksi realitas sering menjadikan suatu peristiwa dengan menambahkan gambaran positif maupun gambaran yang negatif. Kebanyakan peristiwa dapat menimbulkan dugaan-dugaan tidak lepas dari konflik peristiwa yang terjadi. Seperti konflik bernuansa sara khususnya agama yang begitu mudah meluas dalam masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi di suatu tempat dapat mempengaruhi ke tempat-tempat lainnya yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas. Menurut Schudson (1995:141-142), berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, simbol dan nilai-nilai, bagaimana realitas dijadikan berita tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Apabila proses pemaknaan selalu menggunakan simbol unsur nilai-nilai tertentu maka mustahil berita merupakan wajah atau pencerminan dari suatu realitas itu sendiri, maka peristiwa yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda karena adanya perbedaan cara melihat dalam hal ini cara membingkainya, atau cara mewacakannya, namun perbedaan realitas itu pada akhirnya dianggap sesuatu hal yang wajar.

Berita yang disajikan bukanlah realitas yang sesungguhnya karena berita tersebut melalui proses seleksi. Apa yang dimunculkan media melalui berita akan memperlihatkan penekanan terhadap satu aspek tertentu, dan juga menyamarkan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh media. Hal ini dimungkinkan karena para pemilik dan praktisi media yang berbeda latar belakang dan lingkungan sosial politiknya menjadi salah satu partisipan wacana, bahkan posisinya bisa mewarnai atau mempengaruhi partisipasi yang lainnya. Kekuatan media dalam membentuk pesan atau mengembangkan wacana dipengaruhi oleh karakteristik organisasi media dan kerja kaum profesional yang terlibat didalamnya. Menurut Gallagher sebagaimana dikutip Gurevetch (dalam Rusadi 2002:9) ada dua sumber keterbatasan organisasi media dalam memproduksi berita yaitu dari sumber *ekstern* dan *intern*. Hambatan eksternal umumnya bermula pada aspek kepentingan komersial atau politik. Sementara itu hambatan internalnya mengenai rutinitas kerja para praktisi media itu sendiri, seperti dalam bidang keorganisasiannya atau mengenai komunikator media, yang mempengaruhi dalam proses produksi media yaitu ideologi.

Pada prakteknya jika dilihat dari aspek internal media, pertumbuhan industri media di Indonesia sekarang ini sudah mulai berkembang dalam bentuk penggabungan kelompok usaha yang terjadi dari berbagai macam perusahaan. Beberapa media telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dua kelompok pemilik yang memiliki penerbitan yang cukup banyak adalah Kelompok Kompas Gramedia. Penggabungan perusahaan terjadi tidak saja berupa pemilikan media dalam satu jenis media, tetapi juga dalam pemilikan silang media seperti: stasiun televisi PT. Transpora Corporation atau Trans TV, telah menggandeng TV7, sehingga berubah nama menjadi Trans 7. kasus ini membuktikan bahwa media di Indonesia telah

memasuki satu tingkatan masa pertumbuhan di mana media telah menjadi suatu industri. Pola bentuk industri media ini kemungkinan akan memberikan dampak terhadap suatu wacana di dalam media. Maka pada tingkatan ini media dalam mengemas suatu berita akan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti faktor politik, ideologi, agama dan komersial.

Di Indonesia pada jaman orde baru maupun jaman reformasi membuktikan bahwa media memiliki kekuatan penuh terhadap hegemoni kekuasaan. Jika pada jaman orde baru media menjadi alat kekuasaan negara, maka pada jaman reformasi media menjadi ajang perebutan berbagai macam kekuasaan dan kepentingan, baik atas nama individu maupun kelompok.

Melihat kasus-kasus di atas media mempunyai dampak yang penting sekali, karena dapat menghadirkan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat, bukan saja melalui isi yang tertulis, tetapi juga yang telah dikemas dalam bentuk wacana-wacana yang penuh dengan makna simbolik. Media massa ketika menghadirkan berbagai macam wacana mengenai politik atau kenyataan sosial pada dasarnya media dipengaruhi oleh ideologi media yang dianutnya. Pada praktek media massa masih bergelut pada peraturan dan permainan yang bisa mempengaruhi permasalahan menjadi tidak seimbang dan terjadinya penyelewengan-penyelewengan kepentingan. Dalam lingkungan media massa tuntutan atau kepentingan media massa sebagai industri yang mendorong tujuan media pada kepentingan si pemilik modal. Dalam lingkungan eksternal terdapat aturan-aturan dan juga praktek-praktek yang memberikan penindasan terhadap media itu sendiri.

### **Berita sebagai Konstruksi Realitas**

Menurut James W. Carey dalam Eriyanto (2001:25), berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas. Dalam pandangan positivis, berita adalah informasi. Ia dihadirkan kepada khalayak sebagai representasi dari kenyataan, kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Tetapi dalam pandangan konstruksionis, berita itu diibaratkan sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antar berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Secara jelas berita menurut pandangan positivis adalah cermin dan refleksi kenyataan. Karena itu, berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput, sedangkan menurut konstruksionis berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi dari realitas. Karena berita terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. Menurut Daniel C Hallin sebagaimana dikutip oleh Eriyanto (2001:25), berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas. Berita adalah *mirror of reality*, karenanya ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Pandangan ini ditolak oleh kaum konstruksionis. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.

Jadi berita bersifat subyektif atau konstruksi atas berbagai macam ideologi. Pandangan konstruksionis mempunyai penilaian yang berbeda dalam menilai obyektivitas jurnalistik. Hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan sebuah standar yang *rigid*, seperti halnya positif. Hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas berbagai macam ideologi. Pemaknaan seseorang atas sesuatu ideologi bisa jadi berbeda dengan orang lain yang menghasilkan “ideologi” yang berbeda.

Menurut Tuchman sebagaimana dikutip oleh Eriyanto (2001:31), berita adalah hasil transaksi antara wartawan dengan sumber. Realitas yang terbentuk dalam pemberitaan bukanlah apa yang terjadi dalam dunia nyata. Melainkan relasi antara wartawan dengan sumber dan lingkungan sosial yang membentuknya.

Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Sebagai pelapor pendekatan positivis menekankan agar nilai, etika, dan keberpihakan wartawan dihilangkan dalam proses pembuatan berita. Artinya pertimbangan moral dan etika yang dalam banyak hal selalu bisa diterjemahkan sebagai bentuk keberpihakan haruslah disingkirkan. Intinya, realitas haruslah didudukkan dalam fungsinya realitas, yang tidak boleh dikotori oleh pertimbangan yang subyektif. Wartawan sebagai pelapor, ia hanya menjalankan tugas untuk memberitakan fakta, dan tidak diperkenankan munculnya pertimbangan tersebut dapat membelokkan wartawan apapun alasannya menjauhi realitas yang sesungguhnya. Berita ditulis hanyalah untuk fungsi penjas (*eksplanasi*) dalam menjalankan fakta atau realitas dalam suatu media.

Dengan melihat pandangan konstruksioni tentang berita sebelumnya, di mana berita dianggap sebagai suatu hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media, maka sosok berita dan wacana yang dikandungnya, dengan begitu akan tergantung sekali pada bagaimana suatu realitas yang akan dijadikan berita itu dipahami dan dimaknai oleh pembuat berita/media.

### **Wacana Media**

Menurut McGregor, wacana mengacu pada pendeskripsian seseorang dalam beberapa kata. Wacana merupakan cara untuk mengetahui, menilai, dan mengalami. Wacana dapat digunakan untuk penegasan kekuasaan dan pengetahuan, dan dapat pula digunakan untuk perlawanan dan kritik.<sup>14</sup>

Cara penyampaiannya, itu bisa dilakukan melalui percakapan lisan maupun tulisan, misalnya melalui media cetak seperti surat kabar lewat pemberitaannya. Dengan demikian, dari pengertian McGregor ini sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa di balik suatu wacana itu sesungguhnya tersimpan maksud-maksud tertentu dari pembuat wacana, misalnya sebagai cara dalam memanifestasikan kekuasaan. Akan tetapi, makna diskursus sebagaimana dimaksudkan McGregor ini, kerap pula tidak dimaknai sejauh itu oleh kalangan awam. Maknanya, sebagaimana disadari secara awam, tidak lebih dari sekedar perbincangan belaka.

Secara etimologi, wacana dalam kamus online Merriam Webster dijelaskan sebagai berikut : "*Middle English* discours, *from Medieval Latin & Late Latin* discursus; *Medieval Latin*, argument, *from Late Latin*, conversation, *from Latin*, act of running about, *from discurrere to run about*, *from dis-* + *currere to run* — *more at car*."<sup>15</sup> Jadi , wacana sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Latin yang berarti lari kian kemari (yang diturunkan dari *dis-*'dari, dalam arah yang berbeda', dan *currere*'lari'). Lebih jauh, kamus ini juga menjelaskan bahwa diskursus itu juga berarti sebagai suatu pertukaran gagasan melalui bahasa verbal, khususnya dalam suatu percakapan. Disebutkan pula bahwa

<sup>14</sup> McGregor, Sue L.T., dalam, "Critical Discourse Analysis- A Primer", dalam <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>, p. 2.

<sup>15</sup> <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>

diskursus berkaitan dengan bahasa lisan atau tulisan. Lebih luas lagi, diskursus diartikan juga sebagai satu unit kebahasaan (sebagai sebuah percakapan atau sebuah sejarah) yang lebih luas dari pada sebuah kalimat<sup>16</sup>. Dengan pengertian terakhir ini, maka secara leksikal memang telah mengindikasikan bahwa diskursus itu bukan sekedar percakapan belaka, namun di dalamnya tercakup juga mengenai nuansa-nuansa yang memunculkannya secara historical.

Sejalan dengan makna diskursus yang lebih dari sekedar sebuah kalimat itu, karenanya kalangan ilmuwan jadi banyak yang tertarik untuk mempelajarinya. Disebutkan, kalangan yang tertarik menggarap wacana sebagai obyek studi itu, yaitu kalangan ilmuwan yang berasal dari beragam disiplin ilmu social'. Dalam kaitan ini, Menurut Stubb (1983) dan van Dijk (1985) sebagaimana dikutip Fairclough<sup>17</sup> *discourse* merupakan sebuah konsep yang digunakan oleh para analis dan teoritis sosial dan para ahli bahasa. Sebagaimana halnya dengan banyak para ahli bahasa, Fairclough sendiri menggunakan konsep *discourse* ini mengacu pada penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Sementara mengenai sejumlah disiplin ilmu social yang tadi disebutkan tertarik terhadap wacana, yakni mencakup : *linguistics, anthropology, sociology, cognitive psychology, social psychology, international relations communication studies and translation studies*. Dalam menelaah wacana, masing-masing ilmuwan mengikuti asumsi, dimensi analisis dan methodology disiplin ilmunya sendiri.<sup>18</sup>

Namun begitu, ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan *wacana* sebagai sebuah fenomena yang menjadi obyek studi di lingkungan ilmu sosial, yaitu Zellig Harris. Zellig Harris diketahui sebagai orang pertama yang menerbitkan makalah yang bertema *discourse analysis* pada awal tahun 1952. Upaya ini kemudian berlanjut pada munculnya *discourse analysis* sebagai sebuah ilmu, yakni dimasukkan ke dalam ilmu analisis sub bahasa.<sup>19</sup> Dengan demikian, wacana sesungguhnya telah lama dikenal sebagai sebuah jargon dalam ilmu sosial. Namun begitu, wacana kerap terdengar dalam kehidupan sehari-hari hanya sebagai sebuah jargon populer.

Sebagai sebuah jargon populer, wacana kerap dikenal dalam pengertian sebagai pengganti kata perbincangan atau pembahasan mengenai suatu obyek. Bahkan sering digunakan sebagai kata yang mengandung arti wawasan.<sup>20</sup> Dalam khasanah ilmu pengetahuan konsep diskursus memiliki pengertian yang lebih jauh dari pengertian-pengertian populer, dan setiap disiplin ilmu memberikan pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing disiplin ilmu.<sup>21</sup> Hal demikian, misalnya seperti yang diungkapkan James P. Gee<sup>22</sup>. Ia membedakan *discourse* ke dalam dua jenis. Pertama, "*discourse*" (d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya ("*on site*") untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, "*Discourse*" (D besar) yang merangkaikan unsur linguistik pada "*discourse*" (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-

<sup>16</sup> <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>

<sup>17</sup> Fairclough, Norman, (1995), *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 54.

<sup>18</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse\\_analysis](http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis)

<sup>19</sup> Harris et al. (1989) dan Kittredge & Lehrberger (1982), dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse\\_analisis](http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analisis).

<sup>20</sup> Rusadi, Udi, "Diskursus Kerusakan Sosial Dalam Media Massa", disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

<sup>21</sup> Rusadi, Udi, "Diskursus Kerusakan Sosial Dalam Media Massa", disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

<sup>22</sup> Dalam, Hamad, Ibnu. Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi Sebuah Telaah Ringkas ccm .www.um .edu .my Hamad 2007.

linguistik (*non-language “stuff”*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk *non-language “stuff”* ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponen *non-language “stuff”* itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi, berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikator lainnya dalam mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain.<sup>23</sup> Jadi, dalam pandangan Gee ini, terutama dalam pengertian diskursus yang menggunakan D, relevan dengan asumsi yang dikemukakan berdasarkan pengertian leksikal sebelumnya, bahwa diskursus atau wacana itu tidak hanya sekedar bangunan kalimat atau percakapan belaka, melainkan di dalamnya juga mencakup *nuansa-nuansa* yang memunculkan wacana itu sendiri. Terkait dengan pandangan Gee tadi, maka *nuansa-nuansa* yang dapat disebut sebagai komponen *non-language* itu, diantaranya dapat berupa kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi. Kepentingan mana, kemudian membedakan pewacana dalam caranya beraksi, berinteraksi, berperasaan, atau berpenilaian dalam suatu pewacanaan.

Sehubungan dengan wacana itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak berdiri sendiri, yakni sebagai representasi dari hasil rangkaian proses simultan antara unsur linguistik dan non linguistik, maka dalam pendefinisian wacana di antara sesama ilmuwan menjadi berbeda pandang dalam mengartikan wacana. Selain tentunya ada yang terfokus dalam kaitannya dengan bahasa<sup>24</sup>, maka ada pula yang mengartikan diskursus berdasarkan konteks teori dan filosofis. Hal ini, misalnya seperti yang dikemukakan Foucault<sup>25</sup>. Menurutnya diskursus (*discourse*) itu merupakan formasi diskursif (*discursive formation*), yaitu sekelompok pernyataan yang memiliki sistem pembentukan yang tunggal. Dengan demikian, Foucault tampak berupaya mensimplikasi apa yang dikemukakan oleh Gee sebelumnya, yakni dengan cara mereduksi rangkaian proses simultan antara unsur linguistik dan non linguistik yang merepresentasikan wacana.

Sehubungan wacana itu secara filosofis merupakan sebuah formasi diskursif yang dalam proses pembentukannya bersifat tunggal, itu berarti dalam memahami sebuah wacana tidak cukup hanya dengan melihat *bagian luar* yang nota bene menjadi sebagai salah satu bagian saja dari sebuah ketunggalan<sup>26</sup>. Hal yang demikian karena *bagian luar* dimaksud hanyalah baru sebagian saja dari sebuah pewacanaan. Sedang bagian lainnya, seperti dikatakan Gee sebelumnya, yaitu faktor *non-language “stuff”* berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya yang secara teoritis menyebabkan terbedakannya para pewacana itu dalam caranya beraksi, berinteraksi, berperasaan, atau penilaian dalam suatu pewacanaan, belum bisa diketahui. Pemahaman sebuah wacana dengan cara mengabaikan faktor *non-language “stuff”* karenanya dapat menyebabkan kekeliruan. Munculnya kekeliruan, sebab faktor *non-language “stuff”* yang menurut Gee berupa kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi itu tadi, dikatakan Fairclough tidak transparan sifatnya dalam teksasi sebuah pewacanaan sehubungan adanya

<sup>23</sup> Pandangan Gee ini kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan oleh Guy Cook mengenai wacana. Kalau Gee menggunakan konsep *language “on site”* dan *non-language “stuff”*, Guy Cook (dalam, Sobur, 2001:56) memakai konsep teks dan konteks.

<sup>24</sup> Misalnya Teun Van Dijk dan termasuk pula M.A.K. Halliday dan termasuk Fairclough.

<sup>25</sup> Rusadi, Udi, “Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa”, disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.

<sup>26</sup> misalnya rangkaian kalimat dalam sebuah pemberitaan surat kabar atau rangkaian kalimat yang muncul dalam suatu percakapan



upaya pengamanan *power* dan *hegemony* dari sang pembuat wacana<sup>27</sup> itu sendiri. Sebuah kekeliruan yang di sisi lain, tentunya justru bisa membuat konsumen wacana bisa terpedaya dan jika terus mengabaikan faktor *non-language “stuff”* dalam memahami suatu wacana, maka menurut Luke (1997) itu berarti upaya-upaya penindasan, marjinalisasi yang dilakukan pihak tertentu melalui wacana akan terus berkelanjutan tanpa tantangan.<sup>28</sup> Karena itu, guna menghambat atau melawannya, maka wacana menurut Luke harus dikritisi.

Dalam pandangan Fairclough, apa yang dimaksudkan Luke itu, dilakukan dengan tujuan untuk membuka kedok atau membongkar asumsi-asumsi *ideological* yang tersembunyi dalam kata-kata dari teks tertulis maupun percakapan lisan guna melawan dan menolaknya sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui. Dalam kaitan itu, Fairclough (1993)<sup>29</sup> juga menyebutkan bahwa kritisi wacana ini bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis mengenai hubungan-hubungan semu (buram) yang sering terjadi di antara praktik diskursif, teks dan peristiwa-peristiwa dan struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Upaya kritis yang menurutnya dapat dilakukan dengan metode *Critical Discourse Analysis (CDA)* ini, juga dilakukan dalam rangka usaha untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang tidak transparan itu sebagai sebuah faktor dalam upaya mengamankan *power dan hegemony* dari sang pembuat wacana. CDA bertujuan menggali secara sistematis, seringnya hubungan yang kabur antara praktek, teks, peristiwa diskursif dengan struktur, relasi, dan proses sosial budaya yang lebih luas. CDA berusaha untuk menggali bagaimana hubungan non-transparan ini menjadi sebuah faktor dalam mengamankan kekuasaan dan hegemony, dan memberikan perhatian pada keseimbangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, praktek non-demokratis, dan *injustices* lain dengan harapan mendorong masyarakat untuk bertindak korektif. Ada tiga bidang yang menjadi pusat perhatian dari CDA. Wacana yang dibentuk dan dibangun oleh (a) struktur sosial (kelas, status, umur, identitas etnis, dan jenis kelamin) dan oleh (b) budaya. Ekonomi rumah tangga, terdiri dari anggota dari seluruh struktur sosial (tetapi terutama kulit putih, kelas menengah, perempuan), memiliki budaya profesional, yang membentuk dan memaksa wacananya. Apa yang kita katakan sebagai ekonom rumah tangga, dibentuk oleh budaya profesional kami, kehidupan sosial, dan profil anggota (struktur sosial). (c) wacana (kata-kata dan bahasa yang kami gunakan) membantu membentuk dan memaksa identitas, hubungan, dan sistem pengetahuan dan kepercayaan.<sup>30</sup>

Dalam hubungan ini, maka Luke berpendapat bahwa CDA terutama dimaksudkan untuk menggambarkan, menafsirkan, menganalisis dan mengeritik kehidupan sosial sebagaimana tercermin dalam suatu teks. Fokus perhatian CDA terletak pada bagaimana hubungan-hubungan sosial, identitas, pengetahuan dan power itu terkonstruksi melalui bahasa (teks) lisan dan tulisan dalam masyarakat, sekolah, media, dan arena politik. Fairclough (2002), Wodak & Ludwig (1999), sebagai dikutip Luke menilai bahwa wacana selalu melibatkan kekuasaan dan ideologi, terhubung dengan konteks masa lampau dan saat ini (nilai sejarah), dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang karena mereka memiliki latar belakang,

<sup>27</sup> Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.

<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip McGregor, Sue L.T., dalam, <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorcd.html>

<sup>29</sup> Fairclough, N. (1993). Critical Discourse Analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.

<sup>30</sup> Fairclough, N. (2000). *Language and power* (2nd ed.). New York: Longman.

pengetahuan, dan posisi kekuasaan yang berbeda – karena itu, interpretasi yang ‘benar’ itu tidak ada sedangkan yang mungkin adalah interpretasi yang kurang lebih masuk akal atau cukup dapat diterima.<sup>31</sup>

Kemudian, dalam hubungan upaya Fairclough<sup>32</sup> sebelumnya, karenanya ia mengartikan wacana berdasarkan pembedaan kategori. Dalam pembedaan tersebut, Fairclough membuat dua kategori utama tipe diskursus (*discourses*) yang menjadi unsur pokok dari prosedur diskursus (*order of discourse*), yaitu *genre* dan *discourses*. Diskursus merupakan penggunaan bahasa yang merepresentasikan praktek sosial yang berlaku dari sudut pandang tertentu. Diskursus secara umum berhubungan dengan pengetahuan dan konstruksi pengetahuan. Misalnya praktek sosial politik dibedakan dalam penyajiannya dalam diskursus politik liberal, sosial dan Marxis. Sementara genre merupakan penggunaan bahasa yang berhubungan dengan dan melembaga dalam praktek sosial, misalnya seperti wawancara (*genre interview*) dan komoditi periklanan (*genre periklanan*).

Selanjutnya, menurut Fairclough, analisis terhadap wacana jenis tertentu, termasuk wacana media, melibatkan sebuah selingan antara dua fokus yang serupa dan saling melengkapi, keduanya penting yakni : - peristiwa komunikatif (*communicative event*); - susunan wacana (prosedur wacana) (*order of discourse*)<sup>33</sup> Tahapan *communicative event* terdiri dari analisis teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Analisis teks bertujuan untuk mengungkap makna dan dilakukan dengan menganalisis bahasa secara kritis. Analisis *discourse practice* dilakukan pada level proses pembuatan teks yang berguna untuk melakukan penafsiran atas teks dan analisis konsumsi teks. Analisis *sociocultural practice* adalah analisis pada level social (*social analysis*) yang berisikan kajian mengenai keadaan social yang mempengaruhi proses pembuatan teks untuk menjelaskan konteks lahirnya sebuah teks.<sup>34</sup>

Sedangkan tahapan analisis *order of discourse* atau prosedur wacana, berupaya melihat aspek intertekstualitas dan genre. Intertekstualitas merupakan sebuah istilah di mana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang hadir sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi bagian lainnya. Intertekstualitas dalam berita dapat dideteksi dari pengutipan narasumber, apakah secara langsung atau tidak langsung. Selain intertekstualitas terdapat pula genre. Genre yaitu cara pemakaian bahasa yang biasanya disesuaikan dengan lingkup praktek sosialnya. Oleh karena itu lewat model analisis *order of discourse* ini Fairclough ingin menegaskan bahwa wacana media sesungguhnya adalah suatu bidang yang kompleks. Apa yang muncul dalam teks yang diteliti sesungguhnya adalah bagian akhir dari suatu proses yang kompleks dari berbagai kekuatan, aturan, regulasi dan negosiasi yang menghasilkan fakta tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Luke, A. (1997). Theory and practice in critical science discourse. In L. Saha (Ed.), *International encyclopedia of the sociology of education*. Accessed March 6, 2003. <http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Luke/SAHA6.html>

<sup>32</sup> Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 dan 76),

<sup>33</sup> Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 .

<sup>34</sup> Tiamono, Rigakittyndya, 2008, “Analisis Wacana Norman Fairclough”, dalam Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi, Yogyakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 151.

<sup>35</sup> Tiamono, Rigakittyndya, 2008, “Analisis Wacana Norman Fairclough”, dalam Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi, Yogyakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 154-155.

Meskipun begitu, wacana sendiri dalam penelitian ini tidak akan sampai pada tahap apa yang dimaksudkan Fairclough tadi. Akan tetapi, keterkaitan wacana di sini hanya dimaksudkan sebatas pada pandangan Gee sebelumnya, yakni telaah wacana hanya sebatas dalam konteks “d” saja.

## PEMBAHASAN

### A. Wacana Korupsi Anggota DPR Terkait Kasus Aliran Dana BI Di DPR RI Dalam Konstruksi Surat kabar Media Indonesia

Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Dengan demikian, karenanya dalam dalam pandangan konstruksionis, berita itu juga dapat diibaratkan sebagai sebuah drama, atau sejenisnya semisal permainan bola dan lain-lain. Terkait dengan ini, temuan penelitian ini juga memperlihatkan konstruksi Media Indonesia mengenai korupsi anggota DPR itu juga dapat diibaratkan/dimetaforkan seperti sebuah permainan bola, di mana di situ ada pemain, penonton, wasit, dan penjaga garis. Jadi, pewacanaan yang muncul dalam konstruksi media terhadap realitas korupsi anggota dewan terkait kasus aliran dana BI itu bisa dipilah-pilah juga ke dalam suatu tema-tema minor dari sebuah permainan bola. Temuan penelitian ini sendiri, terkait pewacanaan tadi, dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### Wacana Anggota DPR Terkait Kasus Aliran Dana BI Di DPR RI Dalam Konstruksi Surat kabar Media Indonesia

Korpus Analisis/Proses Hukum	Tema Minor/Pewacanaan	Media Indonesia
1. Fase Penyelidikan	1. Pemain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Anggota DPR terlibat kasus korupsi BI</b>, (KPK Periksa Miranda Soal BI Suap DPR (MI, 2 11 2007)</li> <li>2. <b>Anggota DPR menjadi bagian dari kasus korupsi aliran dana BI</b> (BI Sumber Penyuap di DPR (MI 3 11 2007)</li> <li>3. <b>Anggota DPR pendukung kasus korupsi aliran dana BI</b>. (Kasus Dana BI ke DPR Terus Diusut, Paskah Siap Diperiksa (MI, 7 11 2007)</li> <li>4. <b>Anggota DPR pemain dalam kasus korupsi aliran dana BI</b>. (ICW Dimintai Keterangan Soal Dana BI (MI 8 11 2007)</li> <li>5. <b>Anggota DPR menjadi bagian dari kasus korupsi aliran dana BI</b> (KPK akan Periksa Lagi Pejabat BI (MI, 9 11 2007)</li> <li>6. <b>Anggota DPR pendukung terjadinya kasus Suap BI</b> (KPK Akan Periksa Semua Pejabat BI , MI 11/11/2007)</li> <li>7. <b>Anggota DPR menjadi bagian dari penerima suap BI</b>. (KPK Harus Tuntaskan Suap Dana BI (MI 12 Nov 2007.</li> <li>8. <b>Anggota DPR Komisi IX terima suap BI sebesar Rp 31,5 miliar</b>. (KPK Akui Kesulitan Telusuri Aliran Dana BI (MI, 14/11/2007)</li> <li>9. <b>Anggota DPR Antoni Zeidra Abidin terlibat suap aliran dana BI</b>. (Mantan Anggota DPR Mulai Diusut Kejaksaan Bisa Dipraperadilan (MI 15 Nov 07)</li> <li>10. <b>Anggota DPR pendukung terjadinya Suap BI</b> . (Dua Pegawai DPR Diperiksa, (BK Pecah Soal Dana BI (MI, 16 11 2007).</li> <li>11. <b>Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI</b>. (KPK Usut Aliran Dana Rp 100 Miliar -Gubernur BI sudah Diperiksa (MI, 17/11/2007)</li> <li>12. <b>Anggota DPR menjadi pemain dalam kasus aliran dana BI di DPR</b>. (Kerja Sama KPK-BK DPR tidak Masuk Ranah Pidana, MI, 18/11/2007)</li> </ol>

		<p><b>13. Anggota DPR pendukung kasus suap BI</b> (Sembilan Orang masih aktif di DPR (MI, 19 11 2007)</p> <p><b>14. Anggota DPR menjadi pemain dalam kasus aliran dana BI.</b> (Ketua KPK Pesimistis Aliran Dana BI Bisa Tuntas (MI, 20 11 2007)</p> <p><b>15. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI.</b> (Kasus Dana BI Terancam Dipetieskan (MI, 20 11 2007)</p> <p><b>16. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI.</b> (Fraksi Dukung BK Usut Dana BI, MI, 21/11/2007)</p> <p><b>17. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI,</b> (KPK Temui Anwar Nasution (MI, 22112007)</p> <p><b>18. Anggota DPR Pendukung kasus Suap BI.</b> (Uang BI di Balik Dagang Pasal, MI, 26/11/2007)</p> <p><b>19. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI,</b> (KPK Pastikan Ada Aliran dana (MI 26 11 2007)</p> <p><b>20. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI,</b> ('Whistle' Blower Skandal , MI, 26/11/2007)</p> <p><b>21. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI.</b> (Giliran Hendro Diperiksa, MI, 29/11/2007)</p> <p><b>22. Anggota DPR pemain dalam kasus suap BI.</b> (BPK Nilai Kasus Dana BI Pertaruhkan Reputasi KPK, MI, 1/12/2007)</p> <p><b>23. Anggota DPR pemain dalam kasus Aliran dana BI di DPR.</b> Dorongan Politik SBY Dibutuhkan, MI, 2/12/2007)</p> <p><b>24. Anggota DPR pemain dalam kasus aliran dana BI di DPR.</b> (BK akan Minta Keterangan Anwar , MI, 4/12/2007)</p> <p><b>25-/26. Anggota DPR pemain utama dalam kasus aliran dana BI ke DPR,</b> (Dana BI ke DPR Tujuh Cek, MI 14/12/2007)</p> <p><b>27. Anggota DPR pemain utama dalam kasus aliran dana BI ke DPR,</b> (KPK Nilai BI Tidak Kooperatif, MI, 15/12/2007)</p> <p><b>28. Anggota DPR pendukung korupsi dalam kasus aliran dana BI Rp 100 miliar ,</b> (BI akan Tingkatkan Kerja Sama dengan KPK, MI, 18/12/2007)</p> <p><b>29. Anggota DPR pendukung korupsi dalam kasus aliran dana BI Rp 100 miliar ,</b> (BK DPR Periksa Tiga Pejabat BI (MI, 15/1 /2008)</p> <p><b>30. Anggota Dewan pemain pendukung dalam kasus aliran dana BI di DPR ,</b> (Ketua BPK Kecam Pencabutan BAP di KPK , MI, 16/1 /2008)</p> <p><b>31. Anggota Dewan korban Kecerobohan manajemen BI dalam kasus pengaliran dana BI di DPR.</b> (KPK tidak Berniat Hentikan Penyelidikan , MI, 22/1 /2008)</p> <p><b>35. Anggota Dewan penerima suap pejabat BI,</b> (KPK Bidik Dua Anggota DPR, MI, 31/1/2008)</p> <p><b>36. Anggota DPR sudah terbiasa korupsi ,</b> (Sogok di Senayan bukan Hal Baru, MI, 31/1/2008)</p> <p><b>38. Anggota dewan penerima suap pejabat BI.</b> (KPK Cekal Gubernur BI - Tangkap Anggota DPR Penerima Dana, MI 1/2/2008)</p> <p><b>39. Anggota DPR pemain dalam kasus aliran dana BI DPR</b> (Bukti Aliran Dana BI Dihilangkan, MI, 5/2/2008)</p> <p><b>40. Anggota DPR disuap pejabat BI dalam kasus aliran dana BI di DPR,</b> (Aulia Penentu Aliran Dana BI, MI, 8/2/2008)</p>
	2. wasit	--
	3. Penonton	37 Anggota Dewan bukan koruptor, (Mereka Menjawab, MI 31/1/2008)
2. Fase Penyidikan	1. Pemain	--

	2. Wasit	
	3. Penonton	--
3. Fase Penetapan Sebagai tersangka	1. Pemain	32. Anggota Dewan Terima suap pejabat BI. (Burhanuddin Abdullah Jadi Tersangka , MI, 29/1 /2008) 33. Anggota Dewan tersangka penerima suap pejabat BI, (Tersangka Baru dari DPR dan Aparat Hukum (MI, 30/1 /2008) 34. Anggota Dewan terima suap dari pejabat BI. (Kredibilitas BI Babak Belur , MI, 30/1/2008)
	2. Wasit	--
	3. Penonton	--
4. Fase Persidangan	1. Pemain	--
	2. Wasit	--
	3. Penonton	--

## B. Deskripsi Wacana

### 1. DPR Sebagai Pemain Dalam Kasus Korupsi Aliran Dana BI

Dalam konstruksi media terhadap realitas korupsi anggota dewan terkait kasus aliran dana BI itu, berdasarkan hasil analisis teks dengan mengambil *hard news* sebagai genre-nya, memunculkan dua tema minor, yakni, selain “DPR Sebagai Penonton Dalam Kasus Korupsi Aliran Dana BI”, juga “DPR Sebagai Pemain Dalam Kasus Korupsi Aliran Dana BI” itu. Wacana-wacana ini sendiri mereka munculkan dalam konstruksi mereka melalui 40 *genre hard news* terkait realitas yang berhubungan dengan kasus aliran dana BI yang termasuk masih dalam fase-fase penyelidikan dan fase penetapan sebagai tersangka.

Terkait wacana “DPR Sebagai Pemain Dalam Kasus Korupsi Aliran Dana BI” itu sendiri, media tampak sangat dominan memunculkannya. Wacana ini sendiri bermakna bahwa dalam kasus dimaksud, anggota dewan itu sebagai bagian dari pelaku korupsi dalam kasus tersebut. Sebagai bagian, bisa berarti anggota dewan itu menjadi pelaku utama, pelaku pendukung, atau pelaku yang menjadi korban kepentingan pihak lain.

Dalam kaitan anggota dewan sebagai pihak yang menjadi pelaku utama, ini misalnya tampak dari teksasi media pada berita berjudul “BI akan Tingkatkan Kerja Sama dengan KPK (MI, 18/12/2007). Dengan mewacanakan bahwa *Anggota DPR pemain utama dalam kasus aliran dana BI ke DPR*, dalam kaitan peng-konstruksi-an wartawan tentang keluhan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean atas Sikap BI terkait pengusutan kasus aliran dana BI itu, maka wacana tadi dikonstruksikannya dengan cara membangun asumsi bahwa Anggota DPR itu sebagai pemain dalam kasus aliran dana BI ke DPR., sebagaimana tampak dari teksasi media pada p.1, ”....Ia mengatakan pejabat BI tidak memenuhi panggilan KPK dalam rangka mengusut aliran dana RP 100 miliar kepada DPR periode 1999-2004 ....” Selain itu, dalam pengkonstruksiannya, media juga

tampak melakukannya dengan cara-cara lain, misalnya dalam hal merepresentasikan peristiwa sosial, dari segi sosial aktornya, media melakukannya dengan melalui teksasi yang bersifat generik dan *classified* bahwa penerima suap itu adalah “anggota DPR periode 1999-2004”, sebagaimana tampak pada paragraf satu tadi. Termasuk pula melalui fitur karakteristik wacananya dari sisi relasi semantik kata, media mengkonstruksinya melalui bangunan asumsi proporsional, bahwa Pihak BI tidak kooperatif terkait upaya KPK mengusut kasus aliran dana BI di DPR. Dalam hal cara merepresentasikan peristiwa sosial, media juga tampak seolah membesar-besarkan masalah, ini misalnya jika dilihat dari segi proses materialnya yang mengandung sifat *affected* (korban/terkena imbas), yang dengan cara begitu menimbulkan pengertian bahwa semua anggota DPR periode 1999-2004, menjadi pemain utama dalam kasus korupsi melalui aliran dana BI di DPR itu. Masih dalam kaitan cara merepresentasikan peristiwa sosial ini, media juga melakukan konstruksi yang sifatnya mengarahkan penguatan bahwa kasus korupsi itu memang-memang benar-benar terjadi. Konstruksi yang demikian itu terlihat dari relational yang bersifat value/token melalui **p.6**, “...Misalnya uang yang diterima untuk bantuan hukum, katanya digunakan untuk membuat buku. Bikin buku apa *sih* yang sampai menghabiskan dana miliaran rupiah? Ini kan tidak logis dan mengada-ada alias “ngarang”, tegasnya, yang mana secara relational paragraf ini mengandung nilai bahwa begitu banyak dan mudahnya uang cair di BI dan termasuk tentunya ke DPR tadi.

Terkait anggota dewan sebagai pihak yang menjadi pelaku Pendukung kasus Suap BI, yang mana wacananya juga termasuk masih dalam fase-fase penyelidikan dan fase penetapan sebagai tersangka. Wacana ini sendiri bermakna bahwa dalam kasus dimaksud, anggota dewan itu sebagai bagian dari pelaku korupsi dalam kasus tersebut, perilaku mana, dinilai sebagai sesuatu yang sudah biasa dilakukan, atau sudah menjadi habitat dewan. Dengan begitu, dianggap anggota dewan mendukung saja setiap kali ada peluang untuk melakukan praktik-praktik korupsi di lingkungan dewan, termasuk tentunya dalam kasus aliran dana BI ini. Dalam hubungan ini, maka pewacanaan dimaksud diantaranya diteksasi media pada genre berita *hard news* berjudul “Uang BI di Balik Dagang Pasal” edisi MI, 26/11/2007.

Dengan mewacanakan bahwa Anggota DPR sebagai Pendukung kasus Suap BI, dalam kaitan peng-konstruksi-an wartawan mengenai Laporan Koalisi Penegak Citra DPR kepada BK DPR mengenai anggota dewan penerima aliran dana Bank Indonesia (BI) itu, maka wacana tadi antara lain dikonstruksikannya dengan cara membagun sejumlah relasi metaforik antara pertukaran fungsi ujaran atau tipe-tipe pernyataan yang sifatnya menggambarkan memang terjadi transaksi jual beli pasal dalam roses pembahasan RUU antara Komisi IX DPR periode 1999-2004 dan BI. Hal ini, sebagaimana tampak dalam sejumlah paragraf dan judul, yakni : **Judul** : Uang BI di Balik Dagang Pasal; **p.2**, “.....praktik jual beli pasal....”; **p.5**, Kesepakatan itu dibanderol Rp.500 juta.; **p.7**, “.....perlunya pertemuan informal dengan 18 orang anggota Komisi IX di Hotel Mulya.....Pertemuan itu membutuhkan dana Rp 540 juta.”; **p.8**, “.....Uang BI itu dikucurkan , .....karena seluruh *high call* pada dua RUU itu telah berhasil diakomodasi; **p.13**, “.....Apakah uang itu benar-benar mengalir ke Senayan, tentu menjadi tugas BK DPR untuk membuktikannya.”; **p.10**, Penundaan pembahasan amandemen UU

BI pada 2004 pun tak luput dari transaksi dana sebesar Rp 650 juta. Selain itu juga melalui bangunan asumsi bahwa Anggota DPR itu disuap BI terkait kepentingan pembahasan RUU dan anggaran BI. Bangunan demikian tampak pada : **judul berita**, **Uang BI di balik Dagang Pasa**; **p.2**, “....Terlepas dari keengganan BK untuk mengusut, dari dokumen yang beredar, praktik jual beli pasal dalam pembahasan sejumlah RUU terkait BI memang terjadi pada 2004.”; **p.5**, “Setelah berkoordinasi dengan para mantan anggota Panja RUU-LPS yang akan menjabat kembali, telah disepakati untuk mengajukan RUU Likuidasi Bank sebagai RUU yang berdiri sendiri, “begitu bunyi surat itu. Kesepakatan itu dibanderol Rp 500 juta.”. Dari segi pertukaran, fungsi ujaran dan gramatikal mood, tampak juga bahwa media berupaya mengkonstruksinya melalui sisi *Semantic/Gramatical relations between Sentences and clauses*, di mana media berupaya menguatkan pewacanaan tadi melalui **Bentuk Relasi gramatikal** yang sifatnya Embedded, di mana secara gramatika berita ini cenderung menggambarkan untaian paragraf dan kalimat yang merupakan lanjutan sebelumnya menyangkut isi laporan Koalisi Penegak Citra DPR. Dalam merepresentasikan Social event, wartawan juga terlihat berupaya sekali mencitrakan bahwa anggota dewan itu memang pelaku pendukung bagi terjadinya korupsi di lingkungan dewan. Misalnya ini tampak dari proses materialnya, maka media menteksasi aktor antagonisnya secara abstrak, yakni : 16 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang diduga menerima aliran dana BI sebesar Rp 4,5 miliar. Dengan demikian memunculkan aktor yang sifatnya *affected* (korban), yakni 16 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang diduga menerima aliran dana BI sebesar Rp 4,5 miliar. Teksasi yang demikian sudah tentu dimaksudkan untuk menciptakan *image* bahwa semua anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 menjadi pelaku korupsi dalam kasus aliran dana BI di DPR, padahal tidak demikian dalam kenyataannya, namun sejumlah anggota dewan saja.

Masih terkait dalam upaya merepresentasikan Social event tersebut, media juga terlihat berusaha menguatkan pewacanaan tadi. Hal dimaksud misalnya terlihat dari sisi relational, di mana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa metafora-metafora pada sejumlah paragraf mengatribusikan pandangan wartawan bahwa memang terjadi kasus penyuaan BI terhadap 16 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 berkaitan dengan upaya memperlancar pembahasan sejumlah RUU dan anggaran BI. Juga ditemukan bahwa penempatan Koalisi Penegak Citra DPR sebagai aktor pelapor secara relasional mengandung nilai bahwa posisi pelapor adalah sebagai institusi yang berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Dalam hubungan anggota dewan sebagai pelaku yang menjadi korban kepentingan pihak lain, yang wacananya juga termasuk masih dalam fase-fase penyelidikan dan fase penetapan sebagai tersangka, media juga melakukan konstruksi melalui berbagai cara. Wacana ini sendiri bermakna bahwa meskipun anggota dewan sebagai pelaku dalam kasus korupsi aliran dana BI, namun mereka dianggap sebagai korban dari pihak BI yang memiliki kepentingan tinggi dalam pengaliran dana BI itu.

Dalam pewacanaan itu, media melakukannya melalui konstruksi wartawan tentang Peran Aulia dalam pengaliran dana BI ke DPR, dalam genre *hard news* “Aulia Penentu Aliran Dana BI” dalam Media Indonesia edisi 8/2/2008. Wacana yang dimunculkan dalam teks ini, yaitu bahwa Anggota DPR disuap pejabat BI dalam kasus

aliran dana BI di DPR. Indikasi wacana dimaksud tampak dalam **p. 1**, “Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan dan Maman H Somantri diduga berperan besar dalam aliran Rp 100 miliar untuk kepentingan ....amandemen UU BI.”; **p. 4**, “...Pertama, dana Rp 31,5 miliar untuk kalangan DPR dalam rangka amandemen UU BI. Kedua, ...”; **p.7**, :”...Rusli Simanjuntak bertugas mengalirkan ke kalangan DPR. ....”. Wacana yang signifikan ini dibangun melalui asumsi bahwa Anggota DPR terima suap pejabat BI melalui kasus aliran dana BI di DPR. Ini tampak dalam **p. 1**, “Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan dan Maman H Somantri diduga berperan besar dalam aliran Rp 100 miliar untuk kepentingan ....amandemen UU BI.”; **p. 4**, “...Pertama, dana Rp 31,5 miliar untuk kalangan DPR dalam rangka amandemen UU BI. Kedua, ...”; **p.7**, :”...Rusli Simanjuntak bertugas mengalirkan ke kalangan DPR. ....” Selain itu, secara Semantic/Gramatical relations between Sentences and clauses, untuk menguatkan wacana tadi, juga ditemukan bentuk relasi gramatikal yang cenderung dominan bersifat hipotaktik, di mana terjadinya aliran dana BI di DPR itu sangat ditentukan oleh Aulia Pohan. Ini terlihat dari teksasi **judul berita**, ”Aulia Penentu Aliran Dana BI”; **p.1**, ”Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan...berperan besar dalam aliran dana Rp 100 miliar untuk kepentingan ...amandemen UU BI. Selain itu juga melalui pembentukan relasi khusus di mana secara signifikan relasi khusus dibangun ke arah difference, di mana terjadinya aliran dana di DPR itu ditentukan oleh Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan. Untuk semakin menguatkan pewacanaan bahwa dewan sebagai korban penyuaan pihak BI, pewacanaan ini juga dilengkapi oleh relasi semantik seperti melalui *relasi berbentuk kausalitas* seperti terlihat dalam **p.4**, ”Setelah mendapatkan Rp 100 miliar dari YPPI, BI mengalirkan dana untuk dua kepentingan. Pertama, dana Rp 31,5 miliar untuk kalangan DPR dalam rangka amandemen UU BI. Kedua, ...”, atau melalui *relasi berbentuk aditif* sebagaimana terlihat dalam **p.7**, ”.....teknis pengucuran dana itu dilakukan dua orang. ....Rusli Simanjuntak bertugas mengalirkan ke kalangan DPR. ....”. Di samping itu, melalui sisi pertukaran, fungsi ujaran dan gramatikal mood, teksasi tadi juga memunculkan *predominant grammatical mood* yang sifatnya cenderung interrogative menyangkut belum ditingkatkannya status hukum Aulia Pohan menjadi tersangka dalam kasus aliran dana BI di DPR. Ini tampak dari teksasi pada **p. 8**, ”Anehnya, kata Iman, Aulia Pohan dan Maman Somantri serta anggota dewan gubernur lain yang ikut menyetujui pengaliran dana tersebut hanya diperiksa sebagai saksi. Mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, sesuai ketentuan UU BI keputusan RDG itu bersifat kolektif.”

## 2. DPR Sebagai Penonton Dalam Kasus Korupsi Aliran Dana BI

Terkait wacana sebagai penonton ini, media mewacanakannya dengan ”Anggota Dewan bukan koruptor”. Wacana ini mereka teksasi melalui genre *hard news* berjudul “Mereka Menjawab” yang muncul dalam Media Indonesia edisi 31/1/2008). Dalam *hard news* tersebut, wartawan mencoba mengonstruksikan tentang tanggapan anggota DPR yang diduga menerima aliran dana BI.



Dalam pewartawanan yang demikian, media tampak memang tidak memunculkannya secara dominan. Namun, dengan wacana ini media bermaksud bahwa anggota dewan itu seolah-olah bersih dari persoalan korupsi, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi aliran dana BI itu sendiri. Dalam pewartawanan yang demikian, media mencoba melakukannya lewat pengonstruksian yang bertendensi bahwa anggota dewan itu memang tidak terlibat dalam kasus dimaksud. Pengonstruksian yang demikian, diantaranya muncul dalam wujud *difference* yang hanya memunculkan tokoh-tokoh antagonis, yaitu anggota DPR aktif dan yang sudah mantan yakni Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin.

Penonjolan dua tokoh dimaksud juga disertai teks yang bersifat saling keterkaitan dengan teks yang dimunculkan wartawan sebelumnya (intertekstualitas), guna mendeskripsikan keterkaitan dua tokoh dimaksud. Intertekstualitas ini sendiri diteksasi wartawan dalam p.1, "...Sebelumnya dalam dua kali wawancara dengan Media Indonesia (6 dan 11 November 2007) Antony bertutur, ....".

Indikasi lain yang coba ditawarkan wartawan bahwa kedua tokoh ini tidak terlibat, yaitu tampak dari *assumptions* yang dibentuk media, di mana disebutkan bahwa Anggota Dewan itu bukan koruptor. Ini tampak dalam teksasi mereka dalam p.1, "Saya heran sekaligus mempertanyakan peningkatan status pemeriksaan saya dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....; p.1, "...Saya tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan. ...Saya tengah berada di luar negeri.... Bagaimana saya menerima dana jika sedang di luar negeri. ...Nama saya Antony Zeidra Abidin dan saya tidak pernah menjadi anggota panitia perbankan.". Dengan kata lain, dari segi perepresentasian peristiwa sosial, dari sisi aktor sosial yang dimunculkan, media hanya memasukkan/menginklusi Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin belaka tanpa memasuk tokoh-tokoh lain guna mengimbangi komentar dua tokoh tersebut. Jadi, hanya dua tokoh ini yang mereka aktifasi, sementara pihak lain, walaupun ada (KPK dan BPK), tidak diaktivasi sama sekali oleh media, sehingga menjadikan dua tokoh tadi terkesan sangat difasilitasi oleh media dalam menyampaikan versi opininya terkait penyelidikan kasus aliran dana BI.

Hal lain yang menguatkan adanya wacana bahwa anggota dewan itu tidak terlibat korupsi alias penonton belaka dalam kasus aliran dana BI di DPR adalah menyangkut sisi Semantic/Gramatical relations between Sentences and clauses, terkait relasi semantik yang bersifat alasan, di mana salah satu tokoh tadi, yaitu Antony Zeidra Abidin, membenaran bantahan keterlibatannya diteksasi wartawan dalam p.1, "...Pada sejumlah tanggal yang disebutkan KPK sebagai hari menerima dana dari BI, saya tengah berada di luar negeri. ...". Dalam paragraf serupa juga diteksasikan *relasi berbentuk kontrasif* : p.1, "...Saya tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan. ....". Juga ditopang pula dengan teksasi yang secara relasi gramatikal cenderung dominan bersifat Para taktik, yakni berupa bantahan anggota dewan sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana BI, sebagaimana terlihat pada p.1, "...Saya tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan. ....". Jadi, dengan sejumlah contoh dimaksud, dari segi styles, maka di sini tampaknya Wartawan/media cenderung menempatkan diri sebagai pihak corong pembela kedua anggota DPR yang diduga menerima aliran dana BI, yang menyampaikan bantahan akan tuduhan sebagai penerima dana BI. Ini mereka

bangun diantaranya melalui asumsi bahwa Anggota Dewan bukan koruptor, yang dalam teksasi muncul pada **p.1**, "Saya heran sekaligus mempertanyakan peningkatan status pemeriksaan saya dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....; **p.1**, "....Saya tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan. ...Saya tengah berada di luar negeri.... Bagaimana saya menerima dana jika sedang di luar negeri. ...Nama saya Antony Zeidra Abidin dan saya tidak pernah menjadi anggota panitia perbankan." Dengan styles yang demikian dari segi evaluasi, maka media di sini mencoba mengarahkan nilai-nilai yang sifatnya seolah-olah anggota dewan itu tidak menerima aliran dana BI dalam kasus dimaksud.

Dengan begitu, di sini terlihat sekali bagaimana wartawan itu, dalam pewacanaan anggota dewan terkait kasus aliran dana BI itu, tidak selalu melulu menempatkan pihak anggota dewan dalam posisi yang negatif, namun adakalanya mereka juga menempatkan anggota dewan itu pada posisi yang positif, diantaranya seperti menyangkut wacana ketidakterlibatan anggota dewan tadi.

Meskipun begitu, di sisi lain pada teks yang sama, media juga masih terlihat berupaya tidak menunjukkan keberpihakannya itu, meskipun dari segi teksasinya tampak sangat halus. Beberapa hal yang tampaknya menjadi upaya wartawan dalam mengurangi keberpihakannya itu, misalnya dapat dilihat dari sisi pewacanaan dalam komponen penggunaan fitur karakteristik wacana dari sisi relasi semantik kata, maka dari sisi relasi semantic di antara kata-kata masih ditemukan pada teks melalui penggunaan *colocation* dan metafora. Dari segi *colocation*, maka kedua tokoh tadi tidak disebutkan lengkap jati dirinya melainkan dengan hanya menulis nama, yakni : Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin. Maksud penggunaan *colocation* yang demikian, tentu saja diarahkan media agar para pembaca tidak secara serta-merta mengasosiasikan dua tokoh dimaksudkan sebagai dua tokoh yang memang berasal dari pihak DPR, melainkan dua tokoh yang bisa jadi bukan berasal dari DPR. Dengan kata lain, penggunaan *colocation* ini dimaksudkan agar pembaca tidak menjadi jelas mengenai siapa Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin itu. Segi lainnya yaitu terkait penggunaan metafora, sebagaimana tampak dalam **Judul**, "Mereka Menjawab" dan **p.1**, "...dimintai keterangan.." Ini juga bisa menjadi bentuk upaya wartawan dalam mengurangi keberpihakannya terhadap kedua anggota dewan tadi. Metafor "Mereka Menjawab" yang sebenarnya berarti "Mereka Membantah", adalah bentuk eufimisme dari media yang sekaligus menjadi bentuk pembelaan wartawan terhadap kedua tokoh. Demikian juga halnya dengan metafora "...dimintai" yang berarti pemeriksaan, juga menjadi bentuk eufimisme wartawan terhadap kedua tokoh, yang dengan begitu wartawan bermaksud agar kedua tokoh dikesankan keterlibatannya belum terlalu jauh dalam kasus penyelidikan kasus korupsi aliran dana BI itu.

### 3. DPR Sebagai Wasit Dalam Kasus Korupsi Aliran Dana BI

Terkait dengan posisi media dalam pewacanaan, menurut Eriyanto (2001: 36), maka dalam perspektif konstruktivis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas nilai, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Dengan mengutip Tony Bennet, dijelaskannya bahwa media itu

dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.

Terkait posisinya yang berfungsi menjadi agen konstruksi sosial tadi, maka dalam hubungan realitas korupsi anggota DPR menyangkut kasus aliran dana BI di DPR, maka penjelasan Eriyanto itu terlihat memang memiliki relevansi. Relevansi ini tampak dari konstruksi-konstruksi media melalui teksasi mereka pada sejumlah genre *hard news*. Dari situ diketahui tidak ada satupun yang berupaya mewacanakan anggota dewan itu sebagai wasit dalam kasus korupsi aliran dana BI. Pewacanaan anggota dewan sebagai wasit dalam kasus korupsi yang bisa berarti bahwa anggota dewan sebagai pihak yang “bersih” berfungsi sebagai pengadil terhadap pelaku-pelaku korupsi itu, bagi media bukanlah sebagai pilihan yang tentunya tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Berdasarkan wacana yang dominan yang mereka munculkan dalam konstruksi realitas mengenai korupsi anggota dewan dalam kasus aliran dana BI, yakni anggota dewan sebagai pemain, maka kepentingan mereka di sini bisa diartikan bahwa media sebagai agen konstruksi sosial yang mengharapkan segera diadilinya para anggota dewan yang terlibat kasus secara hukum.

### C. Diskusi

Dalam pandangan konstruktivis, subjek dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini seperti dikatakan A.S. Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. (dalam, Eriyanto, 2001 : 7).

Terkait dengan penelitian ini, kepemilikan kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dari subjek yang berposisi sentral dalam pewacanaan tadi, memang dapat dijumpai. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari wacana-wacana yang dimunculkan oleh media (subjek) dalam konstruksi realitas mereka mengenai kasus korupsi anggota dewan dalam kasus aliran dana BI di DPR yang mereka teksasikan dalam berbagai *genre hard news*. Dalam hubungan ini, maka bentuk kontrol dalam pewacanaan anggota dewan sebagai pemain dalam kasus aliran dana BI tadi, dilakukan melalui penempatan anggota dewan dalam berbagai posisi dalam kapasitas sebagai pemain korupsi dalam kasus aliran dana BI di DPR. Adakalanya posisi pemain itu dimunculkan dalam bentuk sebagai pemain utama, misalnya ini tampak dari teksasi media pada berita berjudul “BI akan Tingkatkan Kerja Sama dengan KPK (MI, 18/12/2007). Di sisi lain, posisi pemain itu dimunculkan dalam bentuk sebagai Pendukung terjadinya kasus Suap BI, sebagaimana diteksasi media pada genre berita *hard news* berjudul “Uang BI di Balik Dagang Pasa” edisi MI, 26/11/2007. Di lain waktu, posisi pemain tadi, juga dimunculkan dalam bentuk sebagai pelaku yang menjadi korban kepentingan pihak lain, sebagaimana tampak dari teksasi media melalui genre *hard news* “Aulia Penentu Aliran Dana BI” dalam Media Indonesia edisi 8/2/2008.

Bentuk praktik-praktik kontrol dari media tadi juga berwujud dalam pilihan-pilihan wacana yang mereka munculkan dan yang tidak dimunculkan dalam konstruksi mereka mengenai realitas korupsi anggota dewan. Wacana lain yang dimunculkan dalam konstruksi mereka, sesuai temuan penelitian adalah bahwa anggota dewan sebagai penonton dalam kasus dimaksud. Wacana ini mereka teksasi melalui genre *hard news*

berjudul “Mereka Menjawab” yang muncul dalam Media Indonesia edisi 31/1/2008). Dengan wacana ini media bermaksud agar posisi anggota dewan di mata pembaca berada di luar permainan korupsi aliran dana BI, alias *Mister Clean* yang tidak terlibat korupsi. Sementara itu, mengenai pewacanaan anggota dewan sebagai wasit dalam kasus korupsi aliran dana BI, tidak dipilihnya wacana ini juga menjadi bentuk kontrol sikap media dalam proses konstruksi realitas kasus aliran dana BI.

## PENUTUP

Permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana media (Media Indonesia) mengkonstruksi teks/berita realitas korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI dan wacana apa yang muncul dalam pengkonstruksian itu?”. Terkait temuan dan analisis terhadap temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengkonstruksian realitas tentang korupsi Anggota DPR RI terkait kasus aliran dana BI di DPR RI, media mengarahkannya pada munculnya wacana bahwa dalam kasus aliran dana BI tadi, anggota dewan lebih dominan dipilih dalam posisi sebagai pemain korupsi. Sebagai pemain korupsi, anggota dewan diposisikan secara berbeda, yakni sebagai pemain utama, sebagai pemain pendukung, dan sebagaimana pemain yang menjadi korban kepentingan pihak lain. Sementara wacana anggota dewan sebagai wasit dalam kasus korupsi aliran dana BI, tidak pernah dipilih media dalam mengonstruksikan realitas korupsi anggota parlemen terkait kasus aliran dana BI di DPR.

Munculnya pewacanaan yang demikian, secara teoritis ini dimungkinkan karena dalam pandangan konstruktivis, subjek yang dalam hal ini media, dianggap sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana yang memiliki kemampuan dalam melakukan kontrol guna mencapai maksud-maksud tertentu dari media.

## Daftar Pustaka

- Berger, Peter L, Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Penerjemah Hasan Basri. Jakarta: LP3S. 1990.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse and Society*, 4(2), 133-168.
- Fairclough, N. (2000). *Language and power* (2nd ed.). New York: Longman.
- Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*, p. 56 dan 76),
- Hamad, Ibnu. Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi Sebuah Telaah Ringkas ccm .www.um .edu .my Hamad 2007.
- Harris et al. (1989) dan Kittredge & Lehrberger (1982), dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse\\_analisis](http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analisis).
- Littlejohn, W. Stephen, *Theories of human communication*, California: Wadsworth Publishing Company, USA, 2002.
- Luke, A. (1997). Theory and practice in critical science discourse. In L. Saha (Ed.), *International encyclopedia of the sociology of education*. Accessed March 6, 2003. <http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/Luke/SAHA6.html>

- McGregor, Sue L.T., dalam, “Critical Discourse Analysis- A Primer”, dalam <http://www.kon.org/archives/forum/15-1/mcgregorxda.html>, p. 2.
- Moelong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, P.T Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Rusadi, Udi, “Diskursus Kerusuhan Sosial Dalam Media Massa”, disertasi dalam Bidang Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2002.
- Scudson, Michael, *The Power of News*, London Harvard University Press, 1995.
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*, Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Tiamono, Rigakittyndya, 2008, “Analisis Wacana Norman Fairclough”, dalam *Metodologi Riset Komunikasi, Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi*, Yogyakarta, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, hlm. 151.

**Sumber lain :**

- Dalam, Paul SinlaEloE, dalam <http://groups.Yahoo.com/group/indonesian-studies>.
- Transparency Internasional (TI) Indonesia*, dalam <http://www.ti.or.id/polling/9/>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK, hal. 11.
- lihat, [http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan\\_Likuiditas\\_Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia), diambil, 14 Maret 2008).
- ([http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan\\_blbi.html](http://www.pacific.net.id/pakar/sj/permasalahan_blbi.html), taken on fryday, March 14, 2008.
- Lihat, Media Indonesia, Selasa, 29 Januari 2008, Editorial, hlm 1.
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/discourse>
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse\\_analysis](http://en.wikipedia.org/wiki/Discourse_analysis)

**Contoh Pengujian Hubungan Statistik Melalui Rumus Chi Square :**  
Hubungan Motif Menonton Televisi dengan

Kebutuhan Informasi Kriminal Dalam Sergap RCTI

Motif Kadar Kebutuhan	Kognitif		Afektif		Escapist		Companion ship		Jumlah	
	f0	Ft	F0	Ft	f0	ft%	f0	Ft	f	%
<b>Tinggi</b>	<b>6</b>	<b>6,33</b>	<b>17</b>	<b>15,83</b>	<b>12</b>	<b>8,14</b>	<b>3</b>	<b>7,69</b>	<b>38</b>	<b>100,00</b> <b>(45,24)</b>
<b>Sedang</b>	<b>6</b>	<b>4,0</b>	<b>8</b>	<b>10,0</b>	<b>4</b>	<b>5,14</b>	<b>6</b>	<b>4,85</b>	<b>24</b>	<b>100,00</b> <b>(28,57)</b>
<b>Rendah</b>	<b>2</b>	<b>3,66</b>	<b>10</b>	<b>9,16</b>	<b>2</b>	<b>4,71</b>	<b>8</b>	<b>4,45</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b> <b>(26,19)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>		<b>35</b>		<b>18</b>		<b>17</b>		<b>84</b>	<b>100,00</b>

$$X^2 = 11,981, \text{ df } 6, p < 0,10$$

df (derajat kebebasan) untuk tabel 8.1 = (3-1) (4-1) = (2) (3) = 6 (Jml baris -1) (jml kolom-1)

Ft = total baris x total kolom / Total Observasi

Contoh :  $38 \times 14 / 84 = 6,33$

$$38 \times 35 / 84 = 15,83$$

Untuk mengetahui asosiasi/hubungan kedua variabel, maka perlu dicari lebih dulu nilai  $X^2$  - nya.

Menurut Rakhmat (1984 : 135), caranya dengan menggunakan rumus berikut ini : Jumlah  $X^2$  adalah  $\sum (f_0 - f_t)^2$

ft

Berdasarkan rumus tersebut, maka hasil perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Kamar	f0	ft	$(f_0 - f_t)^2$	$\frac{(f_0 - f_t)^2}{ft}$
1	6	6,33	$(-0,33)^2 = 0,109$	0,017
2	17	15,83	$(1,17)^2 = 1,369$	0,086
3	12	8,14	$(3,86)^2 = 14,90$	1,830
4	3	7,69	$(-4,69)^2 = 21,99$	2,860
5	6	4,0	$(2,0)^2 = 4,00$	1,000
6	8	10,0	$(-2)^2 = 4,00$	0,400
7	4	5,14	$(-1,14)^2 = 1,30$	0,253
8	6	4,85	$(-1,15)^2 = 1,32$	0,273
9	2	3,66	$(-1,66)^2 = 2,75$	0,753
10	10	9,16	$(0,84)^2 = 0,70$	0,077
11	2	4,71	$(-2,71)^2 = 7,344$	1,60
12	8	4,45	$(3,55)^2 = 12,60$	2,832
				11,981

Hasil perhitungan  $X^2$  tabel adalah sebesar 11,98. Dengan melihat tabel distribusi  $X^2$ , maka terlihat di situ bahwa untuk p (probabilitas) 0,05, pada df 6 adalah sebesar 12,592. Dengan demikian nilai ini lebih besar dari pada nilai  $X^2$  tabel yang nilainya sebesar 11,981. Ini berarti, hipotesis yang menyebutkan adanya hubungan di antara variabel kebutuhan informasi kriminal dengan motif menonton televisi, dapat ditolak. (Disajikan : Hasyim Ali Imran)